

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik, hal ini dikarenakan meningkatnya tuntutan masyarakat dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu untuk diterapkan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat diwujudkan dengan adanya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sehingga informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai tindakan pengambilan keputusan oleh publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang terdiri dari: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan, dan 4) Dapat Dipahami.

Salah satu karakteristik kualitatif yang sangat berkaitan dengan nilai informasi dalam laporan keuangan pemerintah yaitu keandalan. Sebuah laporan keuangan tidak akan bermanfaat jika penyajian dan penyampaian informasi tersebut tidak andal. Menurut Yusrawati, dkk (2016:23), mengatakan “keandalan merupakan suatu kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid”. Keandalan laporan keuangan menarik untuk diteliti dikarenakan masih terdapat kasus penyelewengan pada laporan keuangan. Pada siaran pers Badan

Pemeriksa Keuangan yang diakses pada website bpk.go.id berdasarkan hasil pemeriksaan bpk menemukan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian senilai Rp1,52 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LKP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu, pada hasil pemeriksaan BPK dalam 16 tahun terakhir (2005 – 30 Juni 2021), BPK telah menyampaikan 621.453 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp282,78 triliun, di antaranya 507.595 rekomendasi kepada pemerintah daerah sebesar Rp64,72 triliun. Atas LKPD tahun 2020, diketahui terdapat 55 LKPD belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebabkan masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD (BPK, 2021). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh melalui laman *website* sumsel.bpk.go.id, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 – 2013 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pada tahun 2014 – 2020, Provinsi Sumatera Selatan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan adanya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Tabel 1.1
Opini BKP Atas LKPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Opini
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Data yang diolah (2022), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Peningkatan kualitas pelaporan dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum bisa menjadi dasar untuk memastikan bahwa suatu pemerintah daerah sudah memberikan pelaporan keuangan daerah yang andal. BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Permasalahan Terkait Kewajaran Laporan Keuangan

No	Permasalahan
1	Adanya kelemahan sistem pengendalian intern;
2	Belum tertatanya barang milik Negara/daerah dengan tertib;
3	Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku;
4	Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
5	Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan;
6	Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Sumber: Data yang diolah, BPKP

Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pada LHP LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, BPK memaparkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah di antaranya adalah pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang belum optimal, kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) dan denda keterlambatan belum dikenakan serta penatausahaan aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum tertib. Menurut Wardani & Andriyani (2017:93), menyatakan bahwa pemerintah masih memerlukan penyajian pelaporan keuangan yang andal sehingga masyarakat dapat percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut telah benar dan valid. Dalam hal ini, terdapat determinan/faktor yang menentukan terkait keandalan laporan keuangan yang terdiri dari beberapa faktor seperti Kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian akuntansi yang memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku guna mencapai tujuan laporan keuangan yang andal. Kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi/instant memiliki pengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Namun, berdasarkan LKJIP tahun 2021 yang diperoleh dari laman webstie bpkad.sumsel.go.id masih terdapat isu-isu strategis yang dihadapi salah satunya ialah dalam hal peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan tugas-tugas keuangan pemerintah daerah. Informasi yang dikutip dari laman webstie setkab.go.id, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah menyatakan bahwa kepala daerah harus memperhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut, prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Faktor yang dapat memberikan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan dari teknologi informasi yaitu mampu memberikan kecepatan dalam memproses transaksi dan menyiapkan laporan serta keakuratan dalam perhitungan. Berdasarkan LKJIP tahun 2021 yang diperoleh dari laman webstie bpkad.sumsel.go.id masih terdapat permasalahan strategis yang dihadapi salah satunya ialah dalam hal pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga didukung dengan pernyataan wakil kementerian keuangan RI yang dikutip dari laman website kemenkeu.go.id yang

mana menyatakan bahwa sangat penting bagi teknologi informasi untuk terus berbenah dalam aspek keuangan agar kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kemajuan teknologi informasi sekaligus mengantisipasi risiko dampak yang tidak diinginkan yang mungkin muncul. Menurut Kosegaran (2017:179), mengatakan bahwa diperlukannya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah mengingat setiap tahunnya pemerintah daerah mengalami peningkatan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) serta kuantitas yang semakin besar dengan kualitas yang semakin rumit dan kompleks.

Laporan keuangan yang berkualitas sangat memerlukan Sistem Pengendalian Intern. Apabila suatu organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan menjadi lebih baik, hal ini dikarenakan tujuan pengendalian intern adalah untuk menentukan keakuratan dan keandalan informasi laporan keuangan dalam suatu organisasi pemerintah. Dalam pengolahan laporan keuangan, apabila sistem pengendalian intern tidak berjalan, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan tersebut sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan yang andal. Menurut Purba, dkk (2021:424), menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan. Sistem Pengendalian Intern di desain untuk mengenali apakah sistem pengendalian intern telah memadai dan mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan pengendalian intern. Adapun berdasarkan temuan BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 terdapat kelemahan atas sistem pengendalian intern dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan 12 pokok-pokok temuan yang dijabarkan dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Temuan Kelemahan SPI Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

No	Temuan BPK
1	Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah Belum Optimal;
2	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp322.862.360,00;
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi di 5 OPD Rp157.687.000,00;
4	Pengelolaan dan Penggunaan Kupon BBM di 3 OPD Tidak Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja BBM/Gas dan Pelumas Sebesar Rp91.712.800,00;
5	Bukti Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Reses Tidak Sesuai dengan Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp376.477.474,00;
6	Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal Pada Enam OPD sebesar Rp5.500.928.568,92 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan sebesar Rp997.441.954,48;
7	Perencanaan Belanja Hibah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Belum Sesuai Ketentuan;
8	Kelebihan Pembayaran Pengadaan Sembako untuk Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Sebesar Rp641.322.643,50;
9	Kelebihan Pembayaran Pajak Belanja Tidak Terduga pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp90.465.548,00;
10	Penatausahaan Persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Tertib;
11	Penyajian Investasi Permanen pada PD Prodexim dan PD Industri Grafika Meru Tidak Dapat Dinilai Kewajarannya; dan
12	Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Tertib.

Sumber: Data yang diolah (2022), LHP LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Adanya temuan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diantaranya keandalan sehingga berdampak pada ketidakwajaran penyajian. Hal tersebut dikarenakan jumlah kesalahan atau ketidaksesuaian penyajian informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu,

pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memberikan perhatian yang lebih terhadap penyajian laporan keuangan sebab laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Selain faktor tersebut, pengawasan keuangan daerah juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan Keuangan Daerah memberikan pengawasan atas rencana yang telah ditentukan dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Hasil dari pengawasan digunakan untuk membandingkan kinerja yang dilakukan, upaya untuk menanggulangi kesalahan/kejadian yang menyimpang dan mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah ini, maka kegiatan yang dilakukan oleh OPD dalam menggunakan anggarannya dan menyusun laporan keuangannya dapat dikontrol sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaan keuangannya. Namun, pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dianggap masih kurang efektif dan efisien yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana, sehingga menyebabkan kerugian Negara atau kasus korupsi. Pada LHP LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa terdapat kerugian Negara atas kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya yang menyebabkan ditundanya pembangunan masjid tersebut. Menurut informasi yang diperoleh dari laman CNN Indonesia menyatakan bahwa akibat penyimpangan tersebut, Kejaksaan Agung mengungkapkan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan membuat Negara merugi setidaknya hingga mencapai Rp130 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses penggunaan dana, tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas yang menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin melemah.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Determinan atau faktor-faktor yang menentukan keandalan

laporan keuangan daerah dengan judul **“Determinan Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini :

1. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dimana masing-masing sampel OPD tersebut ialah Kepala OPD, Sekretaris OPD, Kepala Bidang Keuangan pada OPD dan staf yang melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah secara parsial terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern,

dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan dan penganggaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera dalam merencanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.